Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi XI
Minggu ke-1 Desember
(1 s.d. 7 Desember 2022)
2022

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

INDONESIA MENUJU PENERAPAN RUPIAH DIGITAL

Eka Budiyanti
Analis Legislatif Ahli Madya
eka.budiyanti@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Beberapa tahun terakhir, tren penerbitan mata uang kripto terus mengalami peningkatan. Hal ini memicu bank sentral menerbitkan mata uang digital sendiri, termasuk Bank Indonesia. Pada akhir November 2022, Bank Indonesia merilis *white paper* dari *central bank digital currency* (CBDC) atau Rupiah Digital. Adapun pengembangan Rupiah Digital ini diberi nama Proyek Garuda. Proyek ini akan memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur Rupiah Digital. Penerbitan rumusan *white paper* ini diharapkan dapat menjadi katalisator pengembangan desain CBDC ke depan, agar penerapannya dapat sesuai konteks dan karakteristik kebijakan.

White paper ini menjelaskan bahwa penerapan Rupiah Digital akan diterapkan dalam tiga tahap. *Pertama*, *wholesale* CBDC (W-CBDC) untuk model bisnis penerbitan, pemusnahan, dan transfer antarbank dengan Rupiah Digital. *Kedua*, model akan diperluas menjadi pengembangan model bisnis operasi moneter dan pasar uang. Dan *ketiga*, integrasi W-CBDC dengan retail CBDC (R-CBDC) secara *end-to-end*.

Menurut Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia (*medium of exchange*), Rupiah Digital memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan uang kartal atau Rupiah fisik, yaitu dapat digunakan langsung untuk bertransaksi secara digital. Selain sebagai alat pembayaran, Rupiah Digital juga berfungsi sebagai alat satuan hitung *(unit of account*) yang menjadi standar untuk mengukur nilai pasar suatu barang dan jasa. Fungsi ini akan berguna jika Rupiah Digital digunakan untuk bertransaksi antarnegara secara digital karena ada penghitungan nilai tukar atau kurs. Kemudian, Rupiah Digital juga berfungsi sebagai penyimpan nilai (*store of value*) atau aset sehingga Rupiah Digital dapat disimpan, diambil, dan ditukar di lain waktu dalam sebuah rekening, dompet digital, maupun uang elektronik.

Sedangkan menurut Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual, ada beberapa manfaat dari implementasi Rupiah Digital. *Pertama*, dari sisi ekonomi, Rupiah Digital akan mendorong kemudahan bertransaksi. Kemudahan dalam melakukan transaksi akan sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jika transaksi semakin mudah dan efisien maka peredaran uang akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, Rupiah Digital dapat membantu penyaluran bantuan fiskal seperti bantuan langsung tunai (BLT) agar tepat waktu dan tepat sasaran. *Ketiga*, kedaulatan Rupiah akan terjaga. Saat ini muncul berbagai macam aset digital maka dengan adanya Rupiah Digital akan semakin memantapkan penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran satu-satunya yang sah. Dan *keempat*, efektivitas kebijakan moneter akan semakin optimal karena semua transaksi akan tercatat. Hal ini juga dapat terhindar dari masalah kriminal seperti penghindaran pajak, pencucian uang, dan lain-lain.

Pengembangan mata uang digital harus mampu mengatasi beragam tantangan yang ada. Menurut Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah, terdapat dua tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam pengembangan Rupiah Digital. *Pertama*, Rupiah Digital harus mampu merespons perkembangan aset kripto yang bersifat *decentralized* sementara Rupiah Digital akan bersifat *centralized* atau diatur oleh bank sentral. Dan *kedua*, Bank Indonesia juga harus mengatur posisi Rupiah Digital dengan uang elektronik yang sudah dikembangkan oleh perbankan dan *fintech*.

Mengingat pentingnya keunggulan, fungsi, serta manfaat Rupiah Digital maka Bank Indonesia harus segera menerapkan Rupiah Digital. Hal ini tentunya membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak agar dapat berjalan sesuai dengan konteks dan kebijakan yang berlaku.

Atensi DPR

Rupiah Digital diharapkan mampu menjaga kedaulatan rupiah di era digital, termasuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital serta membuka peluang inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan hal ini tentunya dibutuhkan dukungan serta pengawasan dari berbagai pihak termasuk DPR RI khususnya Komisi XI. Komisi XI perlu mendorong Bank Indonesia untuk segera menerapkan Rupiah Digital. Selain itu melalui fungsi pengawasan DPR RI hendaknya terus mengawasi proses penerapan Rupiah Digital agar sesuai dengan konteks dan karakteristik kebijakan. Dalam penerapan Rupiah Digital, Bank Indonesia harus selalu mempertimbangkan kondisi serta risiko yang mungkin timbul. Dalam hal ini prinsip kehati-hatian dalam menerapkan Rupiah Digital sangat dibutuhkan.

Sumber

kompas.com, 5 Desember 2022;
Kontan, 5 dan 6 Desember 2022; dan
Media Indonesia, 5 dan 6 Desember 2022.

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

https://puslit.dpr.go.id
@puslitbkd_official
©PuslitBK2022

EDITOR
Polhukam Simela Victor M., Prayudi, Novianto M. Hantoro
Ekkuinbang Mandala Harefa, Juli Panglima S., Sri Nurhayati Q., Monika Suhayati, Venti Eka Satya
Kesra Achmad Muchaddam F., Yulia Indahri, Rahmi Yuningsih

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S.
Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake
Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.